

KESENJANGAN PENDAPATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SRAGEN

Middia Martanti Dewi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
middia@bps.go.id

Diterima: September 2019; Disetujui: November 2019

Abstract. *Government efforts to eliminate gender inequality have not yet yielded sweet results. The large number of female professional staff in Sragen Regency apparently was not followed by the high contribution of women's income. Professionals who should have high incomes have not been able to contribute high incomes. This condition may be due to the income gap between men and women. The writing of this study aims to see whether there are still income gaps between men and women. As well as seeing differences in employment characteristics between men and women found in Sragen Regency. This study was written using data from August 2018 Sakernas in Sragen Regency which was analyzed descriptively using graphical visualization. It turns out that there are still visible income gaps between men and women both with the status of entrepreneurs and workers. Besides income, the difference between men and women is also seen in the length of working hours, education level and employment status. Men have longer working hours with more vocational secondary education and more entrepreneurship status. Whereas women work shorter hours with more low education levels and more family/unpaid employee status.*

Keyword: *gender, income, labor, woman*

Abstraksi. *Upaya pemerintah untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender ternyata belum berbuah manis. Banyaknya tenaga profesional perempuan di Kabupaten Sragen ternyata tidak diikuti dengan tingginya sumbangan pendapatan perempuan. Tenaga profesional yang semestinya mempunyai pendapatan yang tinggi, belum mampu memberikan sumbangan pendapatan yang tinggi. Kondisi tersebut mungkin dikarenakan adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Penulisan kajian ini bertujuan untuk melihat masih adakah kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Serta melihat perbedaan karakteristik ketenagakerjaan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di Kabupaten Sragen. Kajian ini ditulis menggunakan data hasil Sakernas Agustus 2018 di Kabupaten Sragen yang dianalisis deskriptif dengan menggunakan visualisasi grafis. Ternyata masih terlihat adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan baik yang berstatus sebagai wirausaha maupun pekerja. Selain pendapatan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga terlihat pada lamanya jam kerja, tingkat pendidikan dan status pekerjaan. Laki-laki memiliki jam kerja yang lebih lama dengan tingkat pendidikan menengah kejuruan lebih banyak dan status wirausaha lebih banyak. Sedangkan perempuan jam kerjanya lebih pendek dengan tingkat pendidikan rendah lebih banyak dan status pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak.*

Kata kunci: *gender, pendapatan, perempuan, tenaga kerja*

PENDAHULUAN

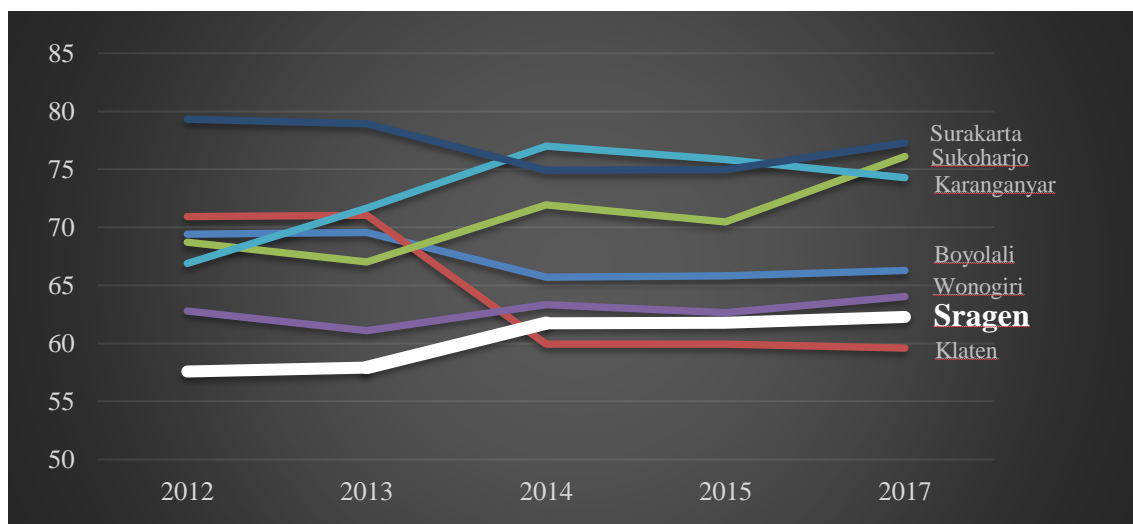
Salah satu tujuan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan

anak perempuan. Target nasional terkait kesetaraan gender tersebut diantaranya mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selama ini perempuan selalu dinomorduakan dari laki-laki. Persepsi

tersebut terbentuk sejak jaman dahulu kala, sehingga susah sekali mengubahnya.

Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 19 Desember 2000 mengeluarkan *Instruksi* Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pegarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pegarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara).

Upaya tersebut terus dilakukan sampai sekarang. BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan data, akhirnya mendapatkan tugas baru. Beberapa indikator terkait gender dihitung oleh BPS untuk mengevaluasi program pengarusutamaan gender di Indonesia. Indikator tersebut diantaranya IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidak-adilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS).

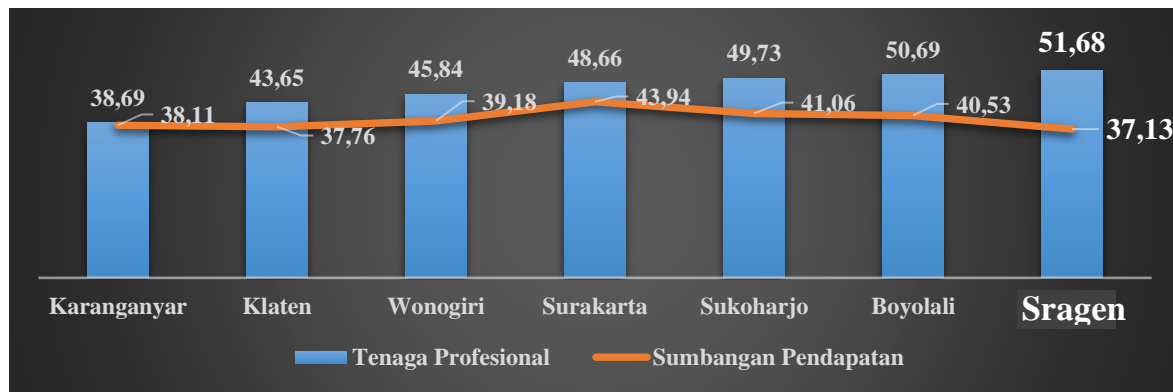


Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Karisidenan Surakarta, 2012-2017

Sumber: BPS

Dari gambar 1, terlihat bahwa diantara kabupaten kota yang ada di wilayah Karisidenan Surakarta, satu-satunya wilayah yang IDGnya konsisten naik dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 hingga 2017 adalah Kabupaten Sragen. Meskipun bukan yang tertinggi tetapi jika dilihat capaiannya yang terus naik dari tahun ke tahun, semestinya kondisi ini bisa menjadi pertanda keberhasilan program

pengarusutamaan gender di Kabupaten Sragen khususnya di bidang ketenagakerjaan. Karena jika melihat kabupaten/kota lain, IDGnya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Bahkan jika melihat Kabupaten Klaten, terjadi penurunan yang cukup tajam. Sehingga bisa saja angka yang tinggi tersebut turun lagi jika kondisinya belum stabil seperti yang terlihat di Kabupaten Sragen.



Gambar 2. Persentase Tenaga Profesional Perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Karisidenan Surakarta, 2017

Sumber: BPS

Salah satu capaian karir seseorang adalah jika berada pada posisi tenaga profesional. Menurut KBBI V profesional berarti bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, atau mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Sedangkan menurut Aisha profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Dan orang disebut profesional jika memiliki tolak ukur perilaku di atas rata-rata manusia pada umumnya. Berdasar pengertian tersebut seharusnya tenaga profesional bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Sragen. Di antara kabupaten/kota lain di Karisidenan Surakarta, Kabupaten Sragen memiliki jumlah tenaga profesional perempuan yang paling tinggi yaitu mencapai 51,68 persen. Tetapi jika dilihat sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Sragen, ternyata justru yang paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 37,13 persen.

Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Masihkah terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga meskipun perempuan sudah

mulai bisa berperan aktif dalam kehidupan ekonomi tetapi sumbangan pendapatannya masih rendah? Dalam hal apa saja terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait beberapa variabel ketenagakerjaan yang masih terjadi di Kabupaten Sragen?

Dalam bidang ketenagakerjaan, pendapatan menjadi ukuran dasar untuk melihat ketidaksetaraan gender. Kesenjangan pendapatan menurut gender sudah lama menjadi perhatian dalam dunia perekonomian. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan keikut-sertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang salah satunya terkait dengan upah yang diberikan kepada pekerja perempuan.

Pencegahan kesenjangan upah antar gender ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 3 yang berbunyi “Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Penetapan peraturan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi upah antar

gender (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

Di Indonesia sendiri kesenjangan penghasilan antar gender masih terjadi. Khotimah (2009) mengemukakan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terjadi karena budaya patriarki yang diterapkan di Indonesia. Rendahnya penghasilan perempuan daripada laki-laki di Indonesia juga tidak terlepas dari budaya patriarki yang sering kali tidak menguntungkan bagi perempuan. Dalam budaya patriarki tersirat bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam hal apapun termasuk ketenagakerjaan. Selain itu faktor subordinat perempuan dalam sosial maupun kultural, *stereotipe* terhadap perempuan juga turut mempengaruhi diskriminasi perempuan dalam pekerjaan. Kondisi tersebut sejalan dengan yang disampaikan Irianto (2015) bahwa adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat wanita terkonsentrasi dalam sejumlah sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus rendah daripada pria.

Dari hasil penelitian International Labour Organization (2013) menyebutkan bahwa banyak analisis praktik ketenagakerjaan dan perekrutan berbasis gender berakar pada pembagian kerja tradisional di mana ranah perempuan secara dominan adalah rumah tangga. Sehingga perempuan yang bekerja akan dihadapkan pada dua peran sekaligus yaitu peran publik dan peran domestik. Peran publik adalah kegiatan di luar rumah untuk memperoleh pendapatan. Peran domestik adalah peran sebagai ibu rumah tangga terkait kegiatan di dalam rumah yaitu mengurus keluarga. Adanya peran ganda pada perempuan memunculkan anggapan bahwa

produktivitas perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga perempuan diberi pendapatan yang lebih rendah daripada laki-laki.

Hennigusnia (2014) menemukan bahwa terjadi kesenjangan upah menurut gender dimana kesenjangan upah tersebut masih didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained*) dan diindikasikan sebagai diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Mardiana (2014) yang menemukan bahwa terjadi kesenjangan penghasilan antar gender dimana kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja lebih besar dibandingkan para wirausaha dan kontribusi faktor diskriminasi lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apapun status pekerjaan seseorang baik wirausaha ataupun pekerja, pendapatan laki-laki masih lebih besar daripada perempuan.

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, tujuan penulisan kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui dalam hal apa saja terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait beberapa variabel ketenagakerjaan.

Penulisan kajian ini diharapkan bisa memberikan gambaran adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga memberikan gambaran tentang perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan terkait variabel ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Dengan informasi tersebut diharapkan penulisan kajian ini bisa

menjadi referensi untuk penulisan kajian selanjutnya.

Menurut konsep dan definisi yang digunakan BPS, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja yaitu keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Bagi pekerja tetap, meskipun sedang tidak bekerja, biasanya tetap memperoleh pendapatan (BPS, 2018). Sehingga jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak untuk memperoleh/menambah pendapatan maka dianggap tidak bekerja.

Yang dimaksud dengan pendapatan dalam penulisan kajian ini mencakup upah/gaji/penghasilan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan baik berupa uang atau barang bagi pengusaha/wirausaha (BPS, 2018).

Menurut status pekerjaannya, yaitu kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, seseorang yang berstatus wirausaha terdiri dari wirausaha yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Sedangkan seseorang yang berstatus pekerja terdiri dari buruh/karyawan/ pegawai, pekerja bebas di

pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerja keluarga/tidak dibayar masuk ke dalam kategori pekerja dikarenakan mereka tidak menanggung risiko atas usaha yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 Kabupaten Sragen, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data yang dirancang khusus untuk memperoleh gambaran umum keadaan ketenagakerjaan. Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Agustus 2018 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap tahun. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan kajian ini, yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan visualisasi grafis dari variabel penelitian.

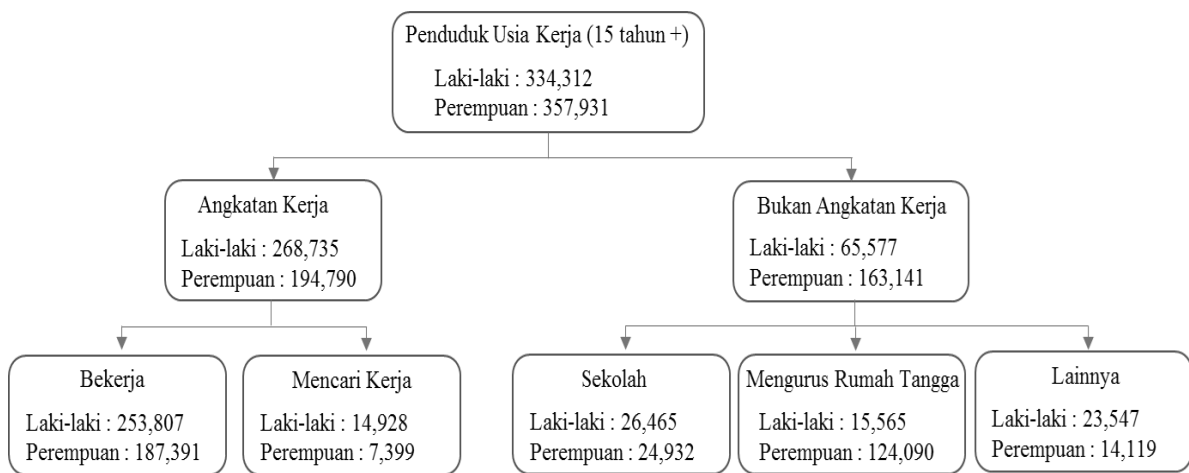
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kabupaten Sragen tahun 2018 dari hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 887,889 jiwa yang terdiri dari 434,976 laki-laki dan 452,913 perempuan. Penduduk perempuan 4.12 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki. Seperti halnya jumlah penduduk total, jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) juga lebih banyak perempuannya. Dari penduduk usia kerja

dipisah menjadi kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Berbeda dengan jumlah sebelumnya, untuk angkatan kerja kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Angkatan kerja laki-laki 37.96 persen lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini wajar mengingat tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga pada umumnya dipegang oleh suami. Meskipun perempuan bekerja bukan

merupakan fenomena yang baru, tetapi masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan istri mengerjakan pekerjaan rumah dan menjalankan fungsi pengasuhan anak (Khotimah, 2009). Pandangan inilah yang akhirnya menjadikan perempuan yang aktif dalam pasar kerja lebih sedikit daripada laki-laki.



Gambar 3. Pengelompokan Penduduk Usia Kerja Kabupaten Sragen, 2018

Sumber: BPS

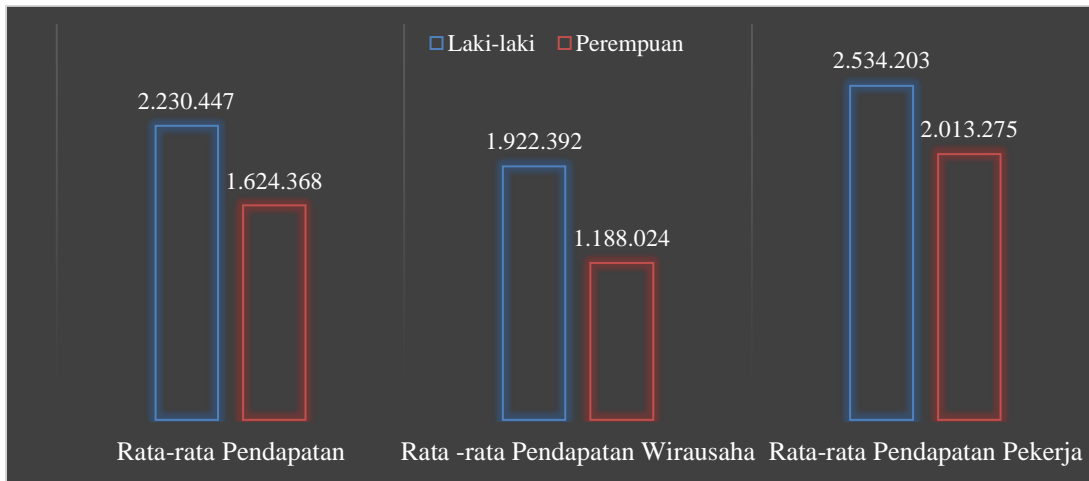
Sejalan dengan pernyataan tersebut, penduduk laki-laki di Kabupaten Sragen yang bekerja 35.44 persen lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Kondisi sebaliknya terjadi pada jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang didominasi oleh perempuan. Jumlah bukan angkatan kerja perempuan hampir 3 kali lipat dari laki-laki. Ini terjadi karena pada umumnya perempuan bertugas mengurus rumah tangga yang menjadi bagian dari bukan angkatan kerja. Penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga hampir 8 kali lipat dari laki-laki. Dari sini sudah terlihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian tugas dalam rumah tangga dan keikutsertaan dalam pasar tenaga kerja. Laki-laki disibukkan dengan peran publik, sedangkan

perempuan disibukkan dengan peran domestik. Kondisi ini sudah membudaya di Indonesia khususnya di wilayah yang menganut budaya patriarki, termasuk Jawa Tengah yang didalamnya terdapat Kabupaten Sragen.

Kesenjangan tersebut ternyata masih berlanjut. Berdasarkan hasil pengolahan data Sakernas Agustus 2018, secara umum pendapatan perempuan yang bekerja ternyata lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pendapatan perempuan yang bekerja dalam sebulan rata-rata sebesar 1,624,368 rupiah, sedangkan pendapatan laki-laki yang bekerja dalam sebulan bisa mencapai 2,230,447. Ini berarti rata-rata pendapatan perempuan hanya 72.83 persen dari rata-rata pendapatan laki-laki.

Kondisi ini tentu memprihatinkan mengingat salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Pembangunan Berkelanjutan adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan

anak perempuan. Dengan salah satu targetnya yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja termasuk di bidang ketenagakerjaan.



Gambar 4. Pendapatan Laki-laki dan Perempuan Sebulan di Kabupaten Sragen, 2018 (rupiah)

Sumber: hasil olah Sakernas

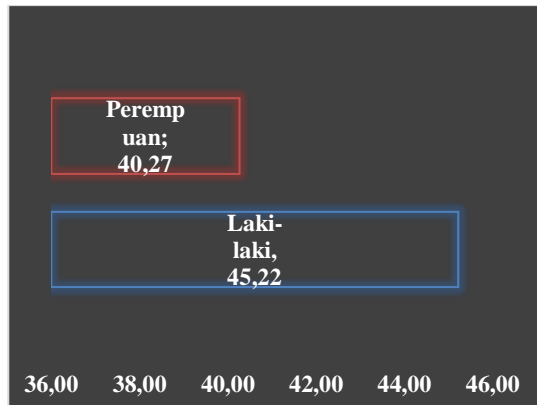
Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, kesenjangan pendapatan wirausaha lebih besar dibandingkan dengan pekerja. Rata-rata pendapatan wirausaha perempuan hanya sebesar 61,8 persen dari pendapatan wirausaha laki-laki. Sedangkan rata-rata pendapatan pekerja perempuan sebesar 79,44 persen dari pendapatan pekerja laki-laki. Perbandingan tersebut dibuat tanpa melibatkan wirausaha maupun pekerja yang tidak mempunyai pendapatan pada pendataan Sakernas. Yaitu yang berstatus sebagai wirausaha yang dibantu buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Besarnya perbedaan pendapatan pada wirausaha laki-laki dan perempuan disebabkan karena perbedaan tujuan dalam melakukan wirausaha. Pada umumnya perempuan melakukan wirausaha dikarenakan fleksibilitas jam kerja dan bukan karena ingin menaikkan pendapatan. Fleksibilitas jam kerja diperlukan

perempuan mengingat peran ganda perempuan khususnya bagi mereka yang sudah berumah tangga. Pekerja perempuan yang sudah berumah tangga dituntut untuk bisa mengatur waktunya. Karena selain peran publiknya sebagai perempuan yang bekerja, mereka juga harus bisa menyelesaikan peran domestik dalam rumah tangganya seperti menyiapkan makanan, mengurus anak, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang justru berpikiran melakukan wirausaha untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Jika dilihat gambar 4, rata-rata pendapatan pekerja baik laki-laki maupun perempuan justru lebih besar dibandingkan rata-rata pendapatan wirausaha. Cakupan dari Sakernas hanya mencatat pendapatan untuk wirausaha yang berusaha sendiri, pendapatan buruh/karyawan/pegawai dan pendapatan pekerja bebas. Tidak adanya informasi terkait pendapatan wirausaha

yang dibantu buruh sehingga rata-rata pendapatan wirausaha menjadi kecil.



Gambar 5. Jam Kerja Selama Seminggu menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sragen, 2018 (jam)

Sumber : hasil olah Sakernas

Dilihat dari gambar 5, rata-rata jam kerja perempuan selama seminggu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata jam kerja laki-laki. Rata-rata jam kerja perempuan selama 40.27 jam dalam seminggu sedangkan rata-rata jam kerja laki-laki mencapai 45.22 jam dalam seminggu. Sehingga wajar apabila pendapatan yang diperoleh perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena jam kerja laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan.

Lebih rendahnya jam kerja perempuan kemungkinan disebabkan karena peran ganda perempuan sehingga pekerja perempuan harus bisa membagi waktu antara peran publik dengan peran domestiknya.

Pencapaian kesetaraan pendidikan menjadi pendorong serta memberi sumbangan terhadap pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan lainnya termasuk pasar tenaga kerja dan kehidupan pribadi (ACDP, 2013). Sehingga perlu dilihat apakah memang terjadi perbedaan tingkat pendidikan pekerja perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki pekerja, bisa terlihat sebaran pekerja menurut tingkat pendidikan. Pada tingkat pendidikan bawah (sampai dengan SD) tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Jika dikaitkan dengan status pekerjaan di gambar 7, kelompok inilah yang pada akhirnya hanya bisa bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Sehingga tidak mengherankan jika pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Kemudian pada tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMU) antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMK proporsi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi bahwa laki-laki harus siap kerja untuk mengantisipasi kondisi ekonomi keluarga yang belum cukup maupun bekal mencari nafkah sehingga lebih banyak laki-laki yang menempuh pendidikan SMK dibanding perempuan.

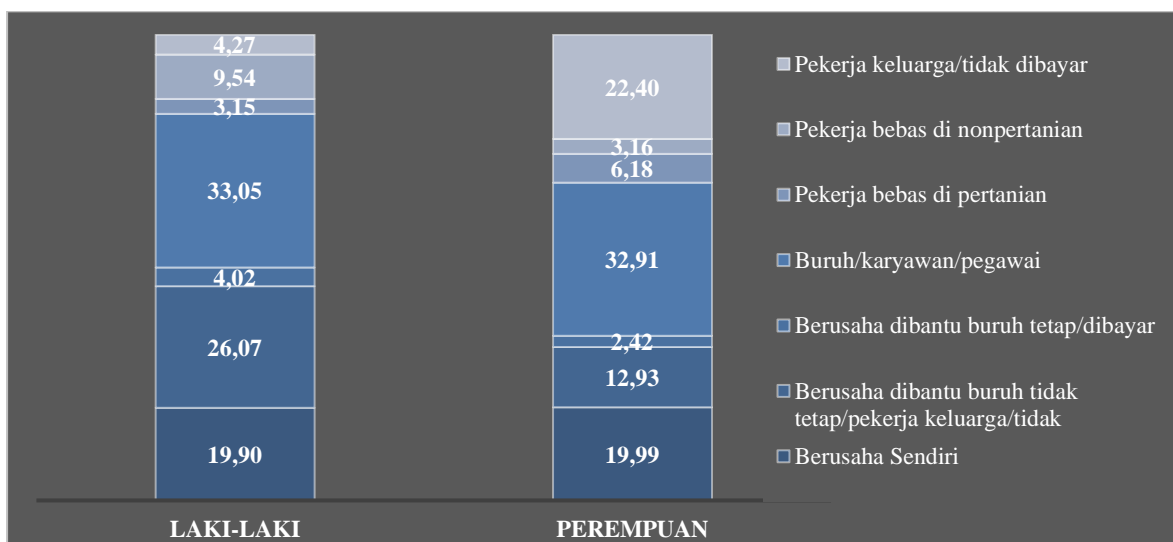
Pada tingkat pendidikan atas (sampai S1/S2/S3) proporsi perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sejalan dengan penghitungan IDG terkait tenaga profesional perempuan dimana Kabupaten Sragen memiliki proporsi yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Karisidenan Surakarta.

Dari uraian sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan seseorang kemungkinan akan berpengaruh terhadap pekerjaannya di kemudian hari. Dan ternyata lebih banyaknya pekerja perempuan yang berpendidikan tinggi sepertinya belum mampu mendongkrak kesenjangan pendapatan laki-laki dan perempuan sehingga kesenjangan pendapatan antar gender masih terlihat.



Gambar 6. Tingkat Pendidikan Pekerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sragen, 2018 (persentase)

Sumber : hasil olah Sakernas



Gambar 7. Status Pekerjaan Pekerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sragen, 2018 (persentase)

Sumber : hasil olah Sakernas

Jika dilihat dari status pekerjaannya, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Status wirausaha lebih banyak dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan status sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Anggapan bahwa perempuan yang bekerja hanya sekedar membantu perekonomian keluarga masih terjadi. Dalam hal ini perempuan diposisikan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar

untuk membantu suaminya dalam memperoleh pendapatan.

Probabilitas perempuan untuk menjadi wirausaha lebih kecil daripada laki-laki, apalagi jika perempuan tersebut berstatus kawin. Hal ini sesuai dengan pendapat Irianto (2015) bahwa wanita dianggap sebagai makhluk yang lembut, irasional, emosional dan mudah menangis sedangkan pria dinilai sebagai makhluk yang independen, rasional dan inisiatif. Anggapan tersebut menjadikan laki-laki dirasa lebih mampu untuk menjadi

wirausaha maupun pekerja pada tingkat atas, sedangkan perempuan hanya bisa menjadi pekerja pada tingkat bawah dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Perbedaan lainnya terlihat pada status pekerja bebas. Perempuan lebih banyak sebagai pekerja bebas di pertanian sedangkan laki-laki lebih banyak sebagai pekerja bebas di non pertanian. Kondisi ini sesuai dengan apa yang disampaikan Viktor (2006) bahwa perempuan cenderung ditarik ke pasar kerja dengan pendapatan rendah kondisi kerja yang buruk dan tidak memiliki keamanan kerja sama sekali, apalagi jika pendidikannya hanya sampai tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama. Perempuan di perkotaan bekerja sebagai pekerja produksi sedangkan perempuan di pedesaan bekerja sebagai buruh tani yang kebanyakan statusnya sebagai pekerja bebas.

SIMPULAN

Dari hasil Sakernas 2018 di Kabupaten Sragen ternyata masih terdapat kesenjangan pendapatan antara

laki-laki dan perempuan. Dimana rata-rata pendapatan perempuan hanya sebesar 72.83 persen dari pendapatan laki-laki.

Dilihat dari lamanya jam kerja, laki-laki mempunyai jam kerja yang lebih lama dibandingkan perempuan. Untuk tingkat pendidikan, pekerja perempuan lebih banyak yang berpendidikan rendah, sedangkan laki-laki banyak yang berpendidikan SMK. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih banyak bekerja sebagai wirausaha sedangkan perempuan banyak yang hanya sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.

Meskipun pekerja yang tidak tercatat pendapatannya sudah dikeluarkan, ternyata masih terjadi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa terjadi dari pasar kerja yang memang sudah membedakan antara pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan dimana laki-laki cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar dari perempuan. Tetapi bisa juga karena perempuan yang memang tidak mengejar karir karena peran ganda yang dimilikinya. Mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, Mendy. <https://jagad.id/definisi-profesional/>. Internet. Diakses tanggal 10 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>. Internet. Diakses tanggal 5 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Pedoman Pencacah Sakernas Agustus 2018*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>. Internet. Diakses tanggal 5 September 2019
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2018*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- BAPPENAS. (2013). *Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : BAPPENAS

- Darwin, Muhadjir M. (2005). *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Grha Guru dan Media Wacana
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hennigusnia. (2014). Kesenjangan Upah antar Jender di Indonesia : Glass Ceiling atau Sticky Floor?. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No. 2 Desember 2014*, 83-96
- International Labor Organization. (2013). *Perempuan dalam Kepemimpinan*. Jakarta : ILO
- Irianto, Koes. (2015). *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Bandung : Alfabeta
- KBBI V. <https://kbbi.web.id/profesional>. Internet. Diakses tanggal 10 September 2019
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. (2016). *Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Khotimah, Khusnul. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Gender dan Anak YINYANG*. IV(1).158-180
- Mardiana. (2014). *Kesenjangan Penghasilan Antar Gender Para Wirausaha Dan Pekerja Tahun 2013*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Pirmana, Viktor. (2006). Earnings Differential Between Male-Female in Indonesia : Evidence from Data Sakernas. *Working Paper in Economics and Development Studies No. 200608*
- SDGs. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima>. Internet. Diakses tanggal 6 September 2019.